

Solusi Konflik Papua

Dialog dengan Semangat Rekonsiliasi dan NKRI

Jakarta|Jurnal Nasional

DIALOG dinilai merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua. Berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini di Bumi Cenderawasih itu terbukti belum juga membuahkan hasil maksimal.

"Hanya dengan dialog penyelesaian di Papua," kata Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam di MPR RI, Senin (4/3).

Kalaupun nantinya hasil dialog tersebut belum juga membuahkan hasil seperti yang diharapkan, setidaknya langkah tersebut diyakini mampu mengurangi tingkat kekerasan di Papua. Yang terpenting harus disepakati adalah, dialog tersebut dilangsungkan dengan dasar saling percaya dan semangat rekonsiliasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kalaupun tidak berhasil, setidaknya akan kurangi kekerasan di Papua. Dialog pun harus didasari saling percaya dan rekonsiliasi," ucap Asvi.

Meski demikian Asvi mengakui bahwa substansi dari dialog itu sendiri hingga kini belum disepakati semua pihak terkait. Selain itu, pihak ataupun tokoh yang akan mewakili pihak Papua dalam dialog tersebut belum menemukan titik temu.

"Substansi apa yang akan didialogkan belum diputusan, begitu juga dengan format dialog juga belum selesai. Kita harus cari solusi, representasi orang Papua itu siapa. Ini sangat penting dibicarakan ke depan" ujar Asvi.

Solusi Konflik Papua

Oleh Administrator

Selasa, 05 Maret 2013 09:31 - Terakhir Diupdate Selasa, 05 Maret 2013 09:35

Asvi tidak menampik adanya pekerjaan rumah dari pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan hingga menghilangkan jiwa warga Papua sejak era Orde Baru lalu. Untuk kasus tersebut, Asvi berharap adanya keseriusan pihak terkait untuk menyelesaikan hal tersebut.

Anggota DPD RI asal Papua, Wahidin Ismail mempertanyakan kesempatan yang diberikan kepada warga Papua untuk memimpin dirinya sendiri. Sejak pemberlakuan otsus, semua jabatan pemimpin di Papua dijabat oleh putera daerah asli. Namun, justru di tangan para putra daerah Papua itu pula sejumlah kasus korupsi terjadi dan pelakunya mereka-mereka juga.

"Sangat mengiris hati bagaimana otsus digulirkan, tokoh lokal diberi kesempatan memimpin SKPD. Namun temuan BPK menyebutkan bahwa banyak penyimpangan kewenangan di Papua," ungkap Wahidin.

Akibat dana otsus yang jumlahnya lebih dari Rp30 triliun tidak dikelola dengan baik, hingga saat ini kesejahteraan warga Papua belum juga terangkat. "Sumber daya mineral yang sangat besar tapi kesejahteraan belum dinikmati oleh masyarakat Papua," tutur Wahidin.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie menegaskan bahwa tidak ada keinginan warga Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Menurutnya, istilah merdeka yang kerap dilontarkan berbagai pihak bukan untuk berpisah dari NKRI. "Saya ingin merdeka, tapi dari kemiskinan. Lebih bagus merdeka di dalam NKRI. Kita butuh kesungguhan," kata Jimmy.

Heri Arland